



**PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN**  
**KELUARGA BERENCANA**



**RENJA AKHIR**  
**TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Ida Sang Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat, rahmat-Nya sehingga kami dapat membuat dan menyampaikan Rencana Kerja Akhir (Renja) Tahun 2022 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan sebagaimana mestinya.

Penyusunan Rencana Akhir Renja ini merupakan pedoman terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2022, dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tabanan yang telah ditentukan. Adapun penyusunan Rencana Kerja Akhir Tahun 2022 merupakan suatu dokumen perencanaan untuk satu tahun anggaran yang memuat kebijakan program dan kegiatan.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Akhir Tahun 2022 ini masih banyak kekurangan maupun kelemahan, untuk itu diharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun guna perbaikan dan penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Tabanan, 26 Agustus 2022

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk  
dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan,



dr. I Nyoman Suratmika, M.Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP.196304101990031014

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkandalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi OPD, Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra OPD menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja OPD disusun oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja OPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Kabupaten Tabanan.

Dokumen Renja OPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan OPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja OPD sangat ditentukan oleh kemampuan OPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi OPD. Berdasarkan Permendagri Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, proses penyusunan Renja OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja OPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja OPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja OPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dalam penyelenggaraan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ditetapkan oleh Peraturan Bupati Tabanan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan.

Berdasarkan ketentuan peraturan tersebut Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan melaksanakan tugas pokok yakni melaksanakan urusan Pemerintah dalam Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan bertanggung jawab kepada Bupati .

Dalam Tahun 2022 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan melaksanakan program kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pengendalian Penduduk
3. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
4. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

## **1.2 Landasan Hukum**

Dasar penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan sebagai berikut :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- b. Peraturan Bupati Tabanan Nomor : 49 Tahun 2012 Sistem dan Prosedur Pengolaan keuangan Daerah.
- c. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 41 tahun 2014 tentang Uraian jabatan Struktural Perangkat Daerah.
- d. Dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2017
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan.
- f. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 52 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Akhir Rencana Kerja ini adalah untuk memberikan pedoman/gambaran tentang perencanaan kegiatan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran yaitu Tahun 2022 dan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan Bupati, guna pencapaian target urusan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Tujuannya adalah Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk Alami dan Terwujudnya Keluarga Berkualitas

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2022 adalah sebagai berikut

: BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### BAB III : TUJUAN DAN SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja

3.3 Program dan Kegiatan

### BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

### BAB V : PENUTUP

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan**

Berdasarkan evaluasi Rencana Kerja Tahun 2021 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan mengajukan usulan program sebanyak 6 dan kegiatan sebanyak 14.

Program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021 sesuai dengan Kebijakan Umum APBD adalah sebagai berikut :

##### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dengan Sub Kegiatan:

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dengan Sub Kegiatan:

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dengan Sub Kegiatan:

- a. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- e. Penyediaan Bahan/Material
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan Sub Kegiatan:

- a. Penyediaan Jasa Surat – Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah  
Dengan Sub Kegiatan:

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

## **2. Program Pengendalian Penduduk**

- Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Dengan Sub Kegiatan:

- a. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB

## **3. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**

- Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal

Dengan Sub Kegiatan:

- a. Komunikasi Informasi dan Edukasi (KB ) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal
- b. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
- Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

Dengan Sub Kegiatan:

- a. Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Pergerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
- Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

Dengan Sub Kegiatan:

- a. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
- b. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya

- Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

Dengan Sub Kegiatan:

- a. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB

#### **4. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**

- Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Dengan Sub Kegiatan:

- a. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- b. Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 dan Capaian Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan tahun 2020 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2020 KABUPATEN TABANAN

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan						
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)					
2	Pemkab Tabanan														
2	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Tabanan														
2	08	1	1	1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD</b>	<b>80 %</b>	<b>70,05 %</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>100%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>100%</b>	
2	08	1	1	1	1	Kegiatan Penunjang Administrasi Perkantoran	Terlaksananya penunjang kegiatan kantor	80 %	70,05 %	80%	80%	100%	80%	80%	100%
2	08	1	1	2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran</b>	<b>82 %</b>	<b>80 %</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>100%</b>	<b>80%</b>	<b>82%</b>	<b>100%</b>	



2	08	1	1	15	4	Kegiatan Pelatihan Pelaporan Data Keluarga Berencana dan Keluarga	Jumlah dokumen laporan data	110 orang.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	08	1	1	15	5	Kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera	Jumlah Kelompok Bina Keluarga yang mendapat Bintek / Pendampingan	5 klp	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	08	1	1	15	9	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Alokon	Jumlah faskes KB yang mendapatkan alokon	40 faskes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	08	1	1	16		<b>Program Kesehatan Reproduksi Remaja</b>	<b>Prosentase Pasangan Usia Subur menikah diatas 21 tahun</b>	<b>74,50%</b>	<b>74,50%</b>	<b>75,00%</b>	<b>75,00%</b>	<b>100%</b>	<b>75,00%</b>	<b>75,00%</b>	<b>100%</b>
2	08	1	1	16	1	Kegiatan Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	Meningkatnya pengetahuan sikap perilaku remaja tentang KRR	120 or	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	08	1	1	16	2	Kegiatan Sekolah Siaga Kependudukan	Meningkatnya Pengetahuan Pendewasaan Usia Perkawinan								
2	08	1	1	17		<b>Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga</b>	<b>Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita ber-KB (%)</b>	<b>87,10%</b>	<b>87,10%</b>	<b>88,75%</b>	<b>88,75%</b>	<b>100%</b>	<b>88,90%</b>	<b>88,90%</b>	<b>100%</b>
2	08	1	1	17	1	Kegiatan Bimtek Kader Bina Keluarga Balita (BKB)	Meningkatkan pengetahuan kader dan kelompok BKB di Kab. Tabanan	10 klp	100%	100%	100%	100%	100%	10 klp	100%
2	08	1	1	17	2	Penyuluhan dan Pergerakan Aparat Desa dan PLKB di Kampung KB	Meningkatkan pergerakan aparat desa dan PLKB di bidang program KKBPK di Kampung KB	100 orang	100%	100%	100%	100%	100%	100 orang	100%
2	08	1	1	17	3	Advokasi PPKBD dan Institusi Masyarakat Pedesaan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan bagi Kader	133 kader	100%	100%	100%	100%	100%	133 kader	100%

## **2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan**

Kinerja pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dimaksudkan adalah kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berkaitan dengan urusan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Adapun sub urusan dari urusan wajib yang menjadi kewenangan bersama antara kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas :

1. Pengendalian Penduduk
2. Keluarga Berencana (KB)
3. Keluarga Sejahtera
4. Pengelolaan Penyuluh KB/PLKB, Standarisasi Pelayanan KB dan Sertifikasi Penyuluh KB (PKB/PLKB)

Sedangkan lingkup pelayanan dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan terdiri atas :

1. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan yang mencakup Seksi Advokasi dan Pergerakan, Seksi Penyuluhan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB dan Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
2. Bidang Keluarga Berencana yang mencakup Seksi Pengendalian Distribusi Alokasi, Seksi Jaminan Pelayanan KB dan Seksi Pembinaan Kesertaan KB
3. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang mencakup Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera, Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita dan Lansia serta Seksi Bina Ketahanan Remaja

Tabel 2.2

## Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	-	-	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
2	Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD			80%	82%	83%	84%	80%	82%	83%	84%	
3	Presentase serapan anggaran sesuai target			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Prosentase Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif			72,50%	73,00%	75,00%	78,00%	72,50%	73,00%	75,00%	78,00%	
5	Prosentase Pasangan Usia Subur menikah diatas 21 tahun			75,00%	76,00%	77,00%	78,00%	75,00%	76,00%	77,00%	78,00%	
6	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita ber-KB			88,90%	89,00%	89,10%	89,50%	88,90%	89,00%	89,10%	89,50%	

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2008 tentang pembentukan susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan adalah melakukan urusan Pemerintah Kabupaten berdasarkan azas Otonomi, Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi dalam Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja pengendalian di bidang kependudukan dan keluarga berencana
- b. Perumusan kebijakan teknis pengendalian di bidang kependudukan dan keluarga berencana
- c. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan tugas di bidang kesekretariatan, pengendalian penduduk penyuluhan dan pergerakan, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- d. Pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kearsipan
- e. Pembinaan PKB/PLKB
- f. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas
- h. Pelaporan hasil pelaksanaan

Hasil analisa kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2019 ada beberapa indikator kinerja yang belum terpenuhi, sehingga diperlukan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Berikut permasalahan yang dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan tahun 2020 :

1. Capaian kinerja untuk indikator persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmeet need*) yang ditargetkan 5% realisasi 4%

### 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Arah kebijakan pembangunan tahun 2022 sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tabanan yang difokuskan pada **Pemerataan Pembangunan Berbasis Potensi Wilayah di Kabupaten Tabanan.**

Dari lima misi Pemerintah Kabupaten Tabanan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan fokus pada misi pertama yaitu Membentuk SDM yang berkualitas, berbudaya dan berkeadilan sosial. Hal tersebut diwujudkan dengan membentuk SDM yang memiliki keunggulan kompetitif dalam penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan pengetahuan dan teknologi.

Adapun Indikator Capaian Kinerja Tahun 2022 yang diinginkan pada aspek layanan umum:

- a. Terkendalinya Angka Kelahiran Penduduk adalah 78%
- b. Meningkatnya Cakupan Pelayanan Dalam Mewujudkan 8 Fungsi Keluarga adalah 8,56%

Atas isu-isu strategis, permasalahan dan prioritas pembangunan serta sasaran yang ingin dicapai maka dibuat perencanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, target, satuan dan pagu indikatif, serta lokasi oleh setiap OPD penanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsi dari urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan tahun 2022 sebanyak 4 Program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pengendalian Penduduk
3. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
4. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Untuk tabel review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan seperti berikut:

Tabel 2.3

## Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022 Kabupaten Tabanan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan: 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tabanan	Prosentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	1 tahun	4.967.753.400,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan: 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tabanan	Prosentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	1 tahun	4.967.753.400,00	
2.	Program Pengendalian Penduduk Kegiatan: 1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tabanan	Persentase Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif	78%	30.000.000,00	Program Pengendalian Penduduk Kegiatan: 1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tabanan	Persentase Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif	-	30.000.000,00	

3.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Kegiatan : 1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi ( KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal 2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	Kab. Tabanan	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	78 %	3.665.128.000,00	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Kegiatan : 1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi ( KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal 2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	Kab. Tabanan	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	78 %	3.665.128.000,00
----	---	--------------	---	------	------------------	---	--------------	---	------	------------------

4	<p>Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)</p> <p>Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</li> <li>2. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</li> </ol>	Kab. Tabanan	Persentase keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang fungsi keluarga	75%	61.967.900,00	<p>Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)</p> <p>Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</li> <li>4. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</li> </ol>	Kab. Tabanan	Persentase keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang fungsi keluarga	75%	61.967.900,00
---	---	--------------	---	-----	---------------	---	--------------	---	-----	---------------

## 2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang direncanakan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan tahun 2022 dengan memperhatikan dan melakukan penelahaan berbagai kebutuhan dari berbagai usulan masyarakat, kegiatan-kegiatan yang dapat diakomodir dalam renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan  
Sub kegiatan Penyuluhan dan Pergerakan Aparat Desa dan PLKB di Kampung KB dan Advokasi PPKBD dan Institusi Masyarakat Pedesaan di Tingkat Kecamatan
2. Bidang Keluarga Berencana  
Sub kegiatan Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontasepsi Bagi Keluarga Miskin dan Pengendalian dan Pendistribusian Alokon
3. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga  
Sub kegiatan Bintek dan Fasilitasi Kader Bina Keluarga Balita (BKB) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera

Untuk tabel usulan program dan kegiatan dari masyarakat tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4  
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2022  
Kabupaten Tabanan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Kegiatan: 1. Penyuluhan dan Pergerakan Aparat Desa dan PLKB di Kampung KB 2. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Kab. Tabanan	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita ber-KB (%)		
2	Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kegiatan: 1. Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontasepsi Bagi Keluarga Miskin 2. Pengendalian dan Pendistribusian Alokon.	Kab. Tabanan	Prosentase Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif		
3	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Kegiatan: 1. Bintek dan Fasilitasi Kader Bina	Kab. Tabanan	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita ber-KB (%)		

	Keluarga Balita (BKB)				
4	Program Kesehatan Reproduksi Remaja Kegiatan: 1. Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	Kab. Tabanan	Prosentase Pasangan Usia Subur menikah di atas 21 tahun		

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah (Kabinet Kerja) 2015-2019, seluruh Kementerian/Lembaga diarahkan untuk turut serta mensukseskan Visi dan Misi Pembangunan 2015-2019 dimana Visi Pemerintah untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah untuk mewujudkan "Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong" dengan misi:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera
5. Mewujudkan Indonesia yang berdaya saing
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

Visi dan Misi Pembangunan tersebut kemudian didukung oleh 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita), dimana BKKBN diharapkan dapat berpartisipasi dalam mensukseskan Agenda Prioritas ke 5 (lima), untuk "Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia".

Salah satu prioritas pembangunan nasional di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2010-2025 adalah mewujudkan penduduk tumbuh seimbang. Sehingga BKKBN berkomitmen akan turut mensukseskan Agenda Prioritas No. 5 (di dalam Nawa Cita), untuk mendukung peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia dengan menjadi "**Lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas**", dimana pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas ditandai dengan menurunnya *Total Fertility Rate* (TFR) menjadi 2,1 dan *Net Reproductive Rate* (NRR)= 1 pada tahun 2025, serta keluarga berkualitas ditandai dengan keluarga yang terbentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan

sejahtera, sehat, maju, mandiri dan memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dan ketentuan Lampiran huruf (n) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, BKKBN mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan dibidang pengendalian penduduk dan KB. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut, BKKBN menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan nasional, pemaduan dan sinkronisasi kebijakan di bidang KKB;
- b. Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di bidang KKB;
- c. Pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan KB;
- d. Penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi di bidang KKB;
- e. Penetapan perkiraan pengendalian penduduk secara nasional;
- f. Penyusunan desain Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK);
- g. Pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB);
- h. Pengelolaan dan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk kebutuhan PUS nasional;
- i. Pengelolaan dan pengendalian sistem informasi keluarga;
- j. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pengendalian pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB dan Kesehatan Reproduksi (KR)
- k. Pengembangan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- l. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pembangunan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- m. Standarisasi pelayanan KB dan sertifikasi tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB);
- n. Penyelenggaraan pemantauan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- o. Pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi di bidang KB;
- p. Penyelenggaraan pelatihan, penelitian dan pengembangan di bidang KKB;
- q. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum di lingkungan BKKBN;

- r. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BKKBN;
- s. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKKBN;
- t. Penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang KKB.

Dalam upaya untuk mendukung arah kebijakan Nasional, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan melakukan Program Keluarga Berencana dengan Kegiatan Pelayanan KIE, Pembinaan Keluarga Berencana, Penyediaan Dukungan Operasional Program Keluarga Berencana Nasional dan Peningkatan Kerjasama Mitra Kerja Program KB Nasional dalam rangka Kemandirian serta kegiatan Pengendalian Kependudukan yang hasil akhirnya dapat menurunkan angka kelahiran total (*Total Fertility Rate/TFR*).

### **3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan**

Adapun Tujuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan adalah:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Indikatornya adalah Nilai SAKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2. Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas,  
Indikatornya adalah Persentase keluarga yang telah melaksanakan 8 fungsi keluarga.

Sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Bupati dan Wakil Bupati terpilih Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan berada pada tujuan 1 (satu) yaitu **Terwujudnya masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan (Aman)** pada sasaran 5 (lima) yaitu Meningkatnya penanggulangan dan penanganan kemiskinan

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan menetapkan sasaran serta indikator yang menjadi tolak ukurannya sebagai berikut :

1. Sasaran :
  1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dispenduk KB
  2. Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk Alami
  3. Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga
2. Indikator Sasaran :
  1. Nilai LKjIP.
  2. Persentase PUS yang menikah diatas 21 tahun.
  3. Persentase penurunan keluarga yang tergolong pra KS dan KS1

Sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tabanan yang tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Tahun 2021-2026 maka penetapan Tujuan Sasaran Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana harus mendukung Tujuan Sasaran RPJMD

Tabel 2.5

## Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Kabupaten Tabanan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
2	Pemkab Tabanan												
2	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Tabanan												
2	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase administrasi pperkantoran Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas PD	Kab. Tabanan	100 %	<b>5.467.753.400,00</b>	APBD		100 %	<b>4.967.753.400,00</b>				
2	14	01											
2	14	01	2.01										
2	14	01	2.01	01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKjIP	Kab. Tabanan	100 %	5.000.000,00	APBD		100%	12.000.000,00
2	14	01	2.01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SAKIP tersedia	Kab. Tabanan	100 %	3.000.000,00	APBD		100 %	7.000.000,00
2	14	01	2.01	07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SAKIP tersedia	Kab. Tabanan	100 %	2.000.000,00	APBD		100%	5.000.000,00
2	14	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas PD	Kab. Tabanan	100 %	4.361.991.000,00	DAU		100 %	4.303.000.000,00
2	14	01	2.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang ada	Kab. Tabanan	100 %	4.356.991.000,00				4.300.000.000,00
2	14	01	2.02	07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Aset Tersedia	Kab. Tabanan	100 %	5.000.000,00				3.000.000,00
2	14	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai LKjIP	Kab. Tabanan	100 %	110.912.000,00				45.900.000,00

2	14	01	2.06	03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Penunjang Kegiatan Kantor	Kab. Tabanan	100 %	2.650.000,00			3.000.000,00
2	14	01	2.06	04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penunjang Kegiatan Kantor	Kab. Tabanan	100 %	33.944.000,00			10.000.000,00
2	14	01	2.06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Penunjang Kegiatan Kantor	Kab. Tabanan	100%	2.250.000,00			2.000.000,00
2	14	01	2.06	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Penunjang Kegiatan Kantor	Kab. Tabanan	100 %	540.000,00			900.000,00
2	14	01	2.06	07	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Material	Terlaksananya Penunjang Kegiatan Kantor	Kab. Tabanan	100 %	28.650.000,00			20.000.000,00
2	14	01	2.06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penunjang Kegiatan Kantor	Kab. Tabanan	100 %	42.878.000,00			10.000.000,00
2	14	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penunjang Kegiatan Kantor	Kab. Tabanan	100 %	47.078.600,00			50.000.000,00
2	14	01	2.07	06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Penunjang Kegiatan Kantor	Kab. Tabanan	100 %	47.078.600,00			50.000.000,00
2	14	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai LKjIP	Kab. Tabanan	100 %	678.171.800,00			419.353.400,00
2	14	01	2.08	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penunjang Kegiatan Kantor	Kab. Tabanan	100 %	3.300.000,00			6.000.000,00

2	14	01	2.08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penunjang Kegiatan Kantor	Kab. Tabanan	100 %	48.188.000,00			78.000.000,00
2	14	01	2.08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penunjang Kegiatan Kantor	Kab. Tabanan	100 %	626.683.800,00			335.353.400,00
2	14	01	2.09		Kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai LKjIP	Kab. Tabanan	100 %	264.600.000,00			137.500.000,00
2	14	01	2.09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Penunjang Kegiatan Kantor	Kab. Tabanan	100 %	41.600.000,00			67.500.000,00
2	14	01	2.09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Penunjang Kegiatan Kantor	Kab. Tabanan	100 %	23.000.000,00			20.000.000,00
2	14	01	2.09	10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Penunjang Kegiatan Kantor	Kab. Tabanan	100 %	200.000.000,00			50.000.000,00
2	14	02			Program Pengendalian Penduduk				36.000.000,00			30.000.000,00
2	14	02	2.01		Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif	Kab. Tabanan	100 %	20.000.000,00			20.000.000,00
2	14	02	2.01	05	Sub Kegiatan Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Cakupan Pasangan Usia Subur menikah diatas 21 tahun	Kab. Tabanan	79 %	20.000.000,00			20.000.000,00

2	14	02	2.02		Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif	Kab. Tabanan	79 %	16.000.000,00				10.000.000,00
2	14	02	2.02	11	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Cakupan Pasangan Usia Subur menikah diatas 21 tahun	Kab. Tabanan	79 %	16.000.000,00				10.000.000,00
2	14	03			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa	Kab. Tabanan	77%	3.746.720.000,00				3.665.128.000,00
2	14	03	2.01		Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Meningkatnya kualitas penanganan kependudukan	Kab. Tabanan	77%	719.685.000,00				390.000.000,00
2	14	03	2.01	01	Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Meningkatnya kualitas penanganan kependudukan	Kab. Tabanan	10 Kecamatan	17.000.000,00				90.000.000,00
2	14	03	2.01	07	Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Meningkatnya kualitas penanganan kependudukan	Kab. Tabanan	10 Kecamatan	702.685.000,00				300.000.000,00
2	14	03	2.02		Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase PKB/PLKB yang mendapat penuatan KKBPK	Kab. Tabanan	77 %	2.959.035.000,00				2.905.128.000,00
2	14	03	2.02	03	Sub Kegiatan Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Progran KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah PKB/PLKB yang mendapat penguatan	Kab. Tabanan	58 orang	2.959.035.000,00				2.905.128.000,00
2	14	03	2.03		Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PUS Miskin yang terlayani KB	Kab. Tabanan	40 Faskes	51.000.000,00				280.000.000,00

2	14	03	2.03	01	Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Faskes termasuk jaringan dan jejaringnya	Kab. Tabanan	40 Faskes	16.000.000,00			90.000.000,00
2	14	03	2.03	07	Sub Kegiatan Pembinaan Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB	Penurunan Jumlah Unmetneed	Kab. Tabanan	5 %	16.000.000,00			90.000.000,00
2	14	03	2.03	11	Sub Kegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Persentase PUS Miskin yang terlayani KB	Kab. Tabanan	78 %	19.000.000,00			100.000.000,00
2	14	03	2.04		Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Meningkatnya Pergerakan Aparat Desa dan PLKB di Kampung KB	Kab. Tabanan	89 %	17.000.000,00			90.000.000,00
2	14	03	2.04	02	Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Persentase meningkatnya pergerakan aparat desa dan PLKB di Kampung KB	Kab. Tabanan	89 %	17.000.000,00			90.000.000,00
2	14	04			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang fungsi keluarga	Kab. Tabanan	76 %	76.000.000,00			61.967.900,00
2	14	04	2.01		Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Meningkatnya Pengetahuan Remaja yang mendapat bimtek	Kab. Tabanan	75 %	36.000.000,00			28.000.000,00
2	14	04	2.01	04	Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Cakupan Pasangan Usia Subur menikah diatas 21 tahun	Kab. Tabanan	75 %	18.000.000,00			14.000.000,00
2	14	04	2.01	07	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Cakupan Pasangan Usia Subur menikah diatas 21 tahun	Kab. Tabanan	75 %	18.000.000,00			14.000.000,00

2	14	04	2.02		Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Peserta KB Aktif	Kab. Tabanan	75 %	40.000.000,00				33.967.900,00
2	14	04	2.02	01	Sub Kegiatan Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader BKB yang mendapat Bimtek	Kab. Tabanan	10 Kelompok	40.000.000,00				

#### **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan pada tahun 2021 disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan program /kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan.

Pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan untuk tahun 2022 bersumber dari dana APBD dan DAK. Besarnya alokasi anggaran per program dan kegiatan untuk belanja langsung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6 Alokasi anggaran per program dan kegiatan untuk belanja langsung tahun 2022:

Nama Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja						Anggaran tahun 2022	
		Capaian		Keluaran Sub			Hasil Kegiatan		
		Program	Target	Kegiatan	Target	Target	Tolok Ukur		Target
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>								<b>8.724</b>	
<b>Program</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>	<b>100%</b>			Nilai LKJIP	90 (A)	<b>4.240.673.750</b>	
<b>Kegiatan</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>	<b>100%</b>					<b>0</b>	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran	100%	Jumlah dokumen Sakip tersedia	2 Dokumen	Nilai LKJIP	90 (A)	0	

		tugas dan fungsi PD						
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	Jumlah dokumen Sakip tersedia	2 Dokumen	Nilai LKJIP	90 (A)	0
<b>Kegiatan</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>	<b>100%</b>					<b>3.309.653.000</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 %	Jumlah layanan gaji dan tunjangan ASN setahun	12 bulan	Nilai LKJIP	90 (A)	3.309.653.000
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung	100 %	Jumlah dokumen aset tersedia	2 Dokumen	Nilai LKJIP	90 (A)	0

		kelancaran tugas dan fungsi PD						
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>	<b>100 persen</b>					<b>26.107.825</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 %	Terlaksananya penunjang kegiatan kantor	1 Tahun	Nilai LKJIP	90 (A)	1.689.500
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 %	Terlaksananya penunjang kegiatan kantor	1 Tahun	Nilai LKJIP	90 (A)	14.159.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase administrasi perkantoran yang	100 %	Terlaksananya penunjang kegiatan kantor	1 Tahun	Nilai LKJIP	90 (A)	562.500

		mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD						
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 %	Terlaksananya penunjang kegiatan kantor	1 Tahun	Nilai LKJIP	90 (A)	0
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 %	Terlaksananya penunjang kegiatan kantor	1 Tahun	Nilai LKJIP	90 (A)	9.696.825
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 %	Terlaksananya penunjang kegiatan kantor	1 Tahun	Nilai LKJIP	90 (A)	0
<b>Kegiatan</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase administrasi perkantoran yang mendukung</b>	<b>100%</b>					<b>121.300</b>

		<b>kelancaran tugas dan fungsi PD</b>						
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	Terlaksananya penunjang kegiatan kantor	1 Tahun	Nilai LKJIP	90 (A)	121.300
<b>Kegiatan</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>	<b>100%</b>					<b>675.171.800</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 %	Terlaksananya penunjang kegiatan kantor	1 Tahun	Nilai LKJIP	90 (A)	3.300.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung	100 %	Terlaksananya penunjang kegiatan kantor	1 Tahun	Nilai LKJIP	90 (A)	45.188.000

		kelancaran tugas dan fungsi PD						
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 %	Terlaksananya penunjang kegiatan kantor	1 Tahun	Nilai LKJIP	90 (A)	626.683.800
<b>Kegiatan</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>	<b>100%</b>					<b>229.619.825</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 %	Terlaksananya penunjang kegiatan kantor	1 Tahun	Nilai LKJIP	90 (A)	23.869.825
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung	100 %	Terlaksananya penunjang kegiatan kantor	1 Tahun	Nilai LKJIP	90 (A)	5.750.000

		kelancaran tugas dan fungsi PD						
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 %	Terlaksananya penunjang kegiatan kantor	1 Tahun	Nilai LKJIP	90 (A)	200.000.000
<b>Program</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>Persentase Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif</b>	<b>78%</b>					<b>0</b>
<b>Kegiatan</b>	<b>Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	<b>Persentase Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif</b>	<b>78%</b>	<b>Cakupan Pasangan Usia Subur menikah diatas 21 tahun</b>				<b>0</b>
	Sub Kegiatan Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Persentase Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif	78%	Cakupan Pasangan Usia Subur menikah diatas 21 tahun	75%	Meningkatnya Keterampilan/Pengetahuan Siswa tentang Kependudukan	10 Kecamatan	0

<b>Kegiatan</b>	<b>Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif	78%					<b>0</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Persentase Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif	78%	PLKB/PKB, Bidan dan Institusi Masyarakat yang mendapatkan Pengetahuan terbaru	10 Kecamatan	Meningkatnya Pengetahuan PLKB/PKB, Bidan dan Institusi Masyarakat dalam pencatatan dan pelaporan data	10 Kecamatan	0
<b>Program</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	Persentase Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif	<b>78%</b>					<b>3.673.639.750</b>
<b>Kegiatan</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>Persentase Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif</b>	<b>78%</b>					<b>1.602.538.000</b>
	Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Persentase Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif	78%	PPKBD dan Institusi Masyarakat yang mendapat advokasi Program KKBPK	10 Kecamatan	Meningkatnya kualitas penganan kependudukan	10 Kecamatan	0

	Sub Kegiatan Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Persentase Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif	78%		10 Kecamatan	Meningkatnya kualitas penganan kependudukan	10 Kecamatan	162.666.000
	Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Persentase Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif	78%	Jumlah jenis sarpras yang diadakan	10 Paket	Meningkatnya kualitas penganan kependudukan	10 Kecamatan	1.439.872.000
Kegiatan	<b>Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	<b>Persentase Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif</b>	<b>78%</b>					<b>638.400.000</b>
	Sub Kegiatan Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Persentase Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif	78%	Meningkatnya jumlah sasaran Pergerakan Pelayanan KB	72,50%	Angka Kelahiran Penduduk	1,10%	0
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Persentase Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif	78%					638.400.000
Kegiatan	<b>Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif</b>	<b>78%</b>					<b>917.021.750</b>

	Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif	78%	Jumlah faskes termasuk jaringan dan jejaringnya	40 Faskes	Angka Kelahiran Penduduk	1,10%	115.834.000
	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif	78%					799.175.000
	Sub Kegiatan Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Persentase Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif	78%	Penurunan jumlah Unmedneed	5%	Angka Kelahiran Penduduk	1,10%	90.000.000
	Sub Kegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Persentase Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif	78%	Persentase PUS miskin yang terlayani KB	78%	Angka Kelahiran Penduduk	1,10%	100.000.000
<b>Kegiatan</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	<b>Persentase Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif</b>	<b>78%</b>					<b>90.000.000</b>
	Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Persentase Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif	78%	Persentase meningkatnya pergerakan aparat desa	89%	Angka Kelahiran Penduduk	1,10%	90.000.000

				dan PLKB di Kampung KB				
<b>Program</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>Persentase Pasangan Usia Subur menikah diatas 21 tahun</b>	<b>78%</b>					<b>410.000.000</b>
<b>Kegiatan</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Persentase Pasangan Usia Subur menikah diatas 21 tahun</b>	<b>78%</b>					<b>190.000.000</b>
	Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Pasangan Usia Subur menikah diatas 21 tahun	78%	Cakupan Pasangan Usia Subur menikah diatas 21 tahun	75%	Cakupan Pasangan Usia Subur menikah diatas 21 tahun	75,00%	95.000.000
	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Pasangan Usia Subur menikah diatas 21 tahun	78%	Cakupan Pasangan Usia Subur menikah diatas 21 tahun	75%	Cakupan Pasangan Usia Subur menikah diatas 21 tahun	75,00%	95.000.000
<b>Kegiatan</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan</b>	<b>Persentase Pasangan Usia Subur menikah diatas 21 tahun</b>	<b>78%</b>					<b>220.000.000</b>

	<b>Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>							
	Sub Kegiatan Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Pasangan Usia Subur menikah diatas 21 tahun	78%	Jumlah Kader BKB yang mendapat Bintek	10 Kelompok	Cakupan peserta KB Aktif	67%	220.000.000
								<b>12.210.400.000</b>

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dalam penyelenggaraan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ditetapkan oleh Peraturan Bupati Tabanan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan berkedudukan sebagai unsur pendukung otonomi daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Akhir (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan tahun 2022 adalah dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai acuan penyusunannya. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan 2016-2021 yang berisi pedoman yang memuat visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tabanan, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan, yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Demikian Rencana Kerja Akhir (RENJA) Tahun 2022 kami susun sebagai bahan acuan dalam pelaksana program/kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2022.

Oleh karena itu masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi kesempurnaan dalam pelaksanaan tugas.

Tabanan, 26 Agustus 2022

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk  
dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan,



dr. I Nyoman Suratmika, M. Kes

Pembina Utama Muda

NIP.196304101990031014